

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan hukum pidana berkaitan dengan perbuatan tindak pidana makar terhadap pemerintah yang sah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu. 1) Bagaimanakah pengaturan perbuatan makar terhadap pemerintah yang sah dalam hukum pidana? 2) Bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah yang sah. Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus. Hasil dari penelitian ini, 1) Dengan disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap masih belum bisa menjawab permasalahan terkait dengan tindak pidana makar yang terdapat dalam Buku Kedua BAB 1 tentang tindak pidana terhadap keamanan negara yaitu maksud dari klausul perbuatan makar terhadap pemerintah yang sah dalam Pasal 193 KUHP dianggap memiliki potensi untuk bertentangan dengan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. 2) Sebagai isu yang kompleks dan sensitif, dalam penerapan pasal ini di temukan beberapa problematika yang sering muncul mulai dari ketidaksetaraan di mata hukum hingga kebebasan berbicara dan hak asasi manusia. Karena dalam beberapa kasus penggunaan Pasal ini sering digunakan oleh beberapa rezim untuk mengkriminalisasi warga negara yang dianggap bertentangan sebagai lawan politik. Maka dari itu, perlunya peninjauan kembalinya penggunaan pasal-pasal yang mengandung perumusan delik formil terutama terhadap pasal makar terhadap pemerintah dan dalam upaya penegakan hukum aparat diminta untuk berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal tersebut.

Kata Kunci: *Hukum Pidana, Makar Terhadap Pemerintah, Politik Hukum Pidana*

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze criminal law regulations relating to the crime of treason against the legitimate government. The formulation of the problem in this research is. 1) How are acts of treason against the government legally regulated in criminal law? 2) How to apply sanctions for perpetrators of the crime of treason against the legitimate government. The type of research used is Juridical-Normative with a Legislative Approach, Conceptual Approach and Case Approach. The results of this research, 1) With the passing of the Draft Criminal Code into Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) it is considered that it still cannot answer the problems related to the crime of treason contained in Second Book CHAPTER 1 concerning criminal acts against state security, namely the meaning of the lawful act of treason against the government clause in Article 193 of the Criminal Code is considered to have the potential to conflict with Articles 7A and 7B of the 1945 Constitution. 2) As a complex and sensitive issue, in The application of this article found several problems that often arise, ranging from inequality in the eyes of the law to freedom of speech and human rights. Because in several cases this article is often used by several regimes to criminalize citizens who are considered to be political opponents. Therefore, it is necessary to review the use of articles containing formal offense formulations, especially the article on treason against the government and in law enforcement efforts, the authorities are asked to be careful in implementing these articles.

Keywords: Criminal Law, Treason Against the Government, Criminal Law Politics